

**HAMBATAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM  
SOSIALISASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

**AYUDI AMANDA SARI  
05703/2008**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI  
JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Sosialisasi  
Pemilu Legislatif Tahun 2014

**Nama** : Ayudi Amanda Sari

**BP/NIM** : 2008/05703

**Jurusan** : Sosiologi

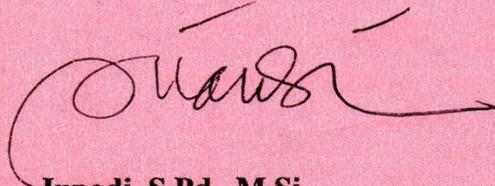
**Program Studi** : Pendidikan Sosiologi Antropologi

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 03 Februari 2015**

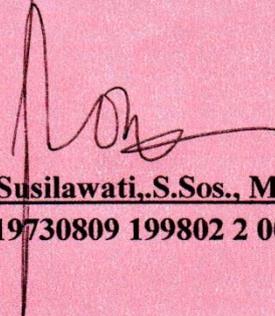
**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



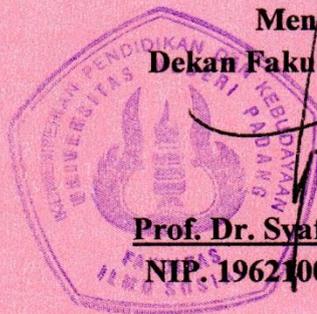
**Junadi, S.Pd., M.Si**  
**NIP: 19680622 199403 1 002**

**Pembimbing II**



**Nora Susilawati, S.Sos., M.Si**  
**NIP: 19730809 199802 2 001**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
**NIP. 19621001 198903 1 002**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Selasa Tanggal 03 Februari 2015

**Judul** : Hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Sosialisasi  
Pemilu Legislatif Tahun 201

**Nama** : Ayudi Amanda Sari

**BP/NIM** : 2008/05703

**Jurusan** : Sosiologi

**Program Studi** : Pendidikan Sosiologi Antropologi

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 03Februari 2015

### Dewan Penguji Skripsi

1. Ketua : Junaidi, S.Pd., M.Si

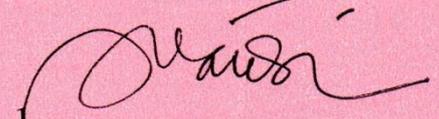
2. Sekretaris : Nora Susilawati, S.Sos., M.Si

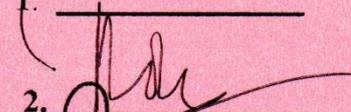
3. Anggota : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si

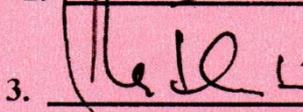
Ike Sylvia, S. IP., M.Si

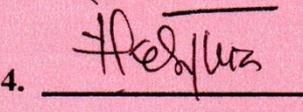
Delmira Syafrini, Sos., M.A

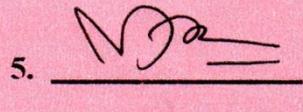
### Tanda Tangan

1.   
\_\_\_\_\_

2.   
\_\_\_\_\_

3.   
\_\_\_\_\_

4.   
\_\_\_\_\_

5.   
\_\_\_\_\_

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayudi Amanda Sari

BP/NIM : 2008/05703

Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul “Hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014” adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2015

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Sosiologi



**Adri Febrianto, S.Sos., M.Si**  
NIP.19680228 199903 1 001

Saya yang menyatakan



**Ayudi Amanda Sari**  
BP/NIM. 2008/05703

## ABSTRAK

**Ayudi Amanda Sari.** “Hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014”.*Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis untuk melihat hambatan-hambatan sosialisasi pihak KPU pada pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat. Permasalahan dilatarbelakangi oleh adanya partisipasi masyarakat baik masyarakat umum maupun dari kalangan mahasiswa tetap rendah pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut terlihat dari data pemilu yang hanya mencapai enam puluh delapan persen, belum memenuhi target nasional. Padahal pihak KPU Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu dengan berbagai cara, baik seperti kegiatan gerak jalan, relawan demokrasi, memasang spanduk, iklan di radio, koran dan TV lokal, *Goes to campus*, sosialisasi melalui kegiatan keagamaan, namun kenyataannya partisipasi masyarakat masih rendah pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apa saja hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dari Robert King Merton. Menurut Robert K. Merton dalam sebuah struktur masyarakat tidak mungkin selalu terjadi integrasi secara tuntas. Merton menganggap selalu ada disfungsi ataupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural. Di dalam penelitian yaitu sosialisasi pemilu legislatif menunjukkan bahwa integritas pada KPU Sumbar atau elemen yang berperan dalam sosialisasi pemilu legislatif tidak selamanya bernilai positif, ada hal-hal disfungsional yang bisa menghambat dan menimbulkan konsekuensi negatif yaitu kurang berjalan baiknya sosialisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus instrinsik. Teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan secara keseluruhan adalah 23 orang. 10 orang dari pihak KPU Provinsi Sumatera Barat, 10 orang dari masyarakat umum, 3 orang dari anggota PPS dan PPK. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya yaitu mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya Tenaga atau SDM Pelaku Sosialisasi, 2) Program KPU Tumpang Tindih, 3) kurangnya peran PPS dan PPK. Hambatan lainnya adalah 5) dari segi masyarakat, A. Masyarakat Beranggapan Negatif Terhadap Pihak KPU, B. Masyarakat Merasa Terganggu 6) Kendala dari Anggaran /Biaya Sosialisasi.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014". Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi, S.Pd, M.Siselaku pembimbing 1 dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, beserta bapak dan ibu tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian terima kasih kepada bapak Adri Febrianto, S. Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh mahasiswa Sosiologi Antropologi khususnya rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Sosiologi Antropologi Angkatan 2008.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis .....	9
F. Penjelasan Konsep .....	12
1) Hambatan .....	12
2) KPU .....	12
3) Sosialisasi Pemilu .....	13
4) Pemilu Legislatif .....	14
G. Metodologi Penelitian .....	15
1) Lokasi Penelitian .....	15
2) Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	15
3) Teknik Pemilihan Informan .....	16
4) Teknik Pengumpulan Data .....	17
5) Triangulasi Data .....	19
6) Analisis Data .....	20
<b>BAB II KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
A. Letak Geografis KPU Provinsi Sumbar .....	23
B. Visi dan Misi KPU Sumatera Barat .....	23
C. Tujuan KPU .....	25
D. Struktur Organisasi KPU Sumbar .....	26
E. Jumlah DPT dan DPK Sumbar .....	26
F. Sosialisasi KPU Sumbar pada Pileg 2014 .....	27
<b>BAB III HAMBATAN KPU DALAM SOSIALISASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI SUMATRA BARAT</b>	
A. Kurangnya Tenaga Kerja/Personil KPU .....	29
B. Program KPU Tumpang Tindih .....	36
C. Kurangnya Peran KPPS dan KPPK .....	46
D. Kendala dari segi Masyarakat .....	54
1) Masyarakat Beranggapan Negatif Kepada Pihak KPU .....	54
2) Masyarakat Merasa Terganggu .....	60
E. Kendala dari segi Biaya .....	63

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data jumlah suara sah dan suara tidak sah serta jumlah pemilih.....	4
Tabel 2. Jumlah pengguna hak pilih tahun 2014.....	7
Tabel 3. Jumlah DPT dan DPK Tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat.....	27
Tabel 4. Tabel Jumlah kecamatan dan nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat..	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Daftar Informan
4. Foto-foto hasil penelitian
5. Surat Tugas Pembimbing
6. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
7. Surat Pengantar Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Lampiran Program Kerja KPU

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan. Pada pemilihan umum, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dilembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Pemilu 2014 menjadi sebuah agenda besar bagi seluruh rakyat Indonesia begitu juga masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Setiap pemilu tentunya menginginkan pemimpin yang berkualitas oleh karena itu pemilih pun harus cerdas.

Untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan tujuan perlu diadakan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu dari 22 tugas KPU yang harus dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Target dilaksanakannya sosialisasi antara adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar<sup>2</sup>.

Program sosialisasi pemilu dari KPU yang telah dilakukan seperti gerak jalan, relawan demokrasi, dengan mendatangi ke Basko Grand Mall, Pasar Raya, agar jangan lupa memilih pada tanggal 5 April. Sosialisasi lainnya adalah *Door to door* yaitu sosialisasi dari pihak KPU yang

---

<sup>1</sup>UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum hlm. 15

<sup>2</sup>Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hlm. 6

mendatangi rumah ke rumah dan pilih secara acak, yang dibantu oleh relawan demokrasi untuk memberikan sosialisasi kepada warga dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2014. Kemudian memajang spanduk, iklan di radio RRI, koran dan tv lokal Padang,maupun dengan sms ke masyarakat. Sosialisasi lainnya adalah melalui mobil keliling di seluruh kota Padang dan kegiatan *goes to campus* pada tanggal 16-17 Desember 2013 di kampus UNP,UBH dan Muhammdiyah, serta kirap atau sejenis pawai partai atau kandidat dari kantor gubernur keliling kota padang pada tanggal 15 Maret 2014.Hal ini disampaikan anggota KPU Sumatera Barat, Aan Wuryanto.<sup>3</sup>

KPU juga bekerja sama dengan LSM pemantau pemilu dalam menggiatkan pendidikan politik masyarakat dengan mengoptimalkan sosialisasi melalui media internet dan jejaring sosial seperti *twitter* dan *facebook*. Di *facebook/twitter* KPU mengundang komunitas kreatif untuk bertukar pikiran tentang upaya meningkatkan minat pemilih dalam pemilu yang akan datang ada 'Ayo Vote', komunitas mural, blogger, komunitas pemilu, jejaring sosial, dan sebagainya<sup>4</sup>.

Tujuandilaksanakannya sosialisasi antara adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar. Namun kenyataannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi

---

<sup>3</sup> <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4508/KPU-Sumbar-Giat-Sosialisasikan-Pemilu-Legislatif>

<sup>4</sup> (<http://ns3.kompas.web.id/read/news/read/2014/03/04/145914/2514935/10/kpu-siapkan-sosialisasi-pemilu-melalui-sosial-media>)

Sumatera Barat masih kurang intens sehingga pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik masih kurang sehingga pada akhirnya partisipasi pemilu juga berkurang khususnya pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.

Sosialisasi pemilu seperti gerak jalan, relawan demokrasi, *goes to campus*, dan lain sebagainya hanya dilakukan sebagai ritual mengajak masyarakat tanpa disertai informasi yang jelas kepada masyarakat tentang persyaratan dan tata cara memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Sosialisasi kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam memilih masih rendah serta munculnya golput yang dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap pemilu.

Kegiatan sosialisasi pemilu sangat penting karena bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu itu sendiri. Oleh karena itu hendaknya bisa dijalankan dengan maksimal hingga masyarakat bisa memahami pentingnya pemilu dan bisa mengetahui tata cara yang benar dalam mengikuti pemilu. KPU seharusnya melaksanakan kegiatan sosialisasi secara maksimal ke seluruh lapisan masyarakat. Karena segala bentuk kegiatan sosialisasi serta penyampaian informasi yang dilakukan oleh KPU ditargetkan untuk meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat baik untuk pentingnya pemilu, yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan jumlah pemilih. Namun kenyataannya hanya 68% tingkat partisipasi pemilih dan hal tersebut tergolong rendah, serta masih ada surat

suara yang tidak sah sebanyak 11,13%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data jumlah suara sah dan suara tidak sah serta jumlah pemilih

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Jumlah suara sah	2,278,870	88,87 %
2.	Jumlah suara tidak sah	285,400	11,13%
3.	Jumlah suara sah + Jumlah suara tidak sah (partisipasi)	2,564,270	68,43%
4.	Jumlah daftar pemilih	3,747,037	

Sumber : <http://www.kpu-sumbarprov.go.id/i>

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat masih ada surat suara tidak sah sebanyak 11.13% dan hal tersebut dikatakan menurun dibandingkan pemilu sebelumnya pada tahun 2009 yaitu 91.04% suara sah dan hanya 8.96% saja surat suarayang tidak sah. Pada pileg 2014 di Provinsi Sumbar juga terdata tingkat partisipasi 68.43% yang tergolong masih rendah dengan target nasional 75%. Berdasarkan hal tersebut menggambarkan sosialisasi yang dilakukan pihak KPU masih kurang intens sehingga masih terdapat elemen masyarakat yang salah dalam memilih serta partisipasimemilih juga rendah.

Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, seperti di Kota Padang, Pariaman, Bukittinggi dan yang lainnya, diketahui banyak warga yang tidak mengetahui jumlah surat suara yang akan dicoblos, warna surat suara dan yang lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa sosialisasi kurang intens dan masih minim sehingga pegetahuan masyarakat tentang pemilu masih rendah yang berakibat juga kepada rendahnya partisipasi pemilu yang

rendah<sup>5</sup>.

Kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih ada saja masyarakat yang tidak mengetahui mengenai jadwal dan waktu pemilu. Masih ada saja masyarakat yang acuh dan tidak memahami arti pentingnya pemilu serta tidak mengetahui tata cara dan persyaratan untuk mengikuti pemilu. Kegiatan sosialisasi pemilu legislatif sangat penting untuk menginformasikan bagaimana tata cara memilih kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemilu legislatif tahun 2014 ada empat pilihan dan hanya satu saja yang menggunakan foto calon legislatif, selebihnya hanya ada daftar nama-nama calon legislatif saja sehingga bisa membuat bingung para pemilih.

Ketua KPU Bapak Husni Kamil Malik di Sumatera menjelaskan lebih dari satu juta warga pemilik hak suara di Sumatera Barat tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu. Jumlah tersebut setara dengan 31 persen lebih dari total jumlah pemilih terdaftar di daerah ini untuk pemilu legislatif. Kota Padang memberikan kontribusi besar terhadap jumlah warga tidak memilih, karena jumlah pemilih di Ibukota Provinsi itu cukup besar sementara tingkat partisipasi sangat rendah.

Dari total jumlah pemilih terdaftar sebanyak 3.747.037 orang, baik di Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT Tambahan, Daftar Pemilih Khusus

---

<sup>5</sup> <http://www.klikpositif.com/news/read/7298/leonardy-harmainy-sebut-sosialisasi-pemilu-minim.html>

(DPK) dan DPK Tambahan hanya 2.564.270 orang yang menggunakan hak pilihnya atau 68,49 persen. Sebanyak 1.182.767 warga pemilik hak suara tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen menyebutkan, besarnya jumlah pemilih di Kota Padang dan rendahnya partisipasi pemilih sangat mempengaruhi rata-rata partisipasi di tingkat Provinsi. Untuk Kota Padang, dari total 656.389 orang pemilih terdaftar, hanya 352.174 orang yang menggunakan hak pilih atau setara dengan 53,65 persen<sup>6</sup>.

Kota Bukittinggi merupakan daerah kedua dengan tingkat partisipasi yang rendah setelah kota Padang. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman hanya 65,23 persen yang menggunakan hak pilih, Kabupaten Tanahdatar 66,45 persen, Kabupaten Agam 67,24 persen serta Kota Payakumbuh 69,94 persen. Daerah kabupaten dan kota lainnya dengan partisipasi berada pada kisaran 70 persen keatas adalah Kabupaten Pesisir Selatan (73,71 persen), Kepulauan Mentawai (76,80 persen), Kota Solok (74,66 persen) dan kabupaten Solok (70 persen).

---

<sup>6</sup> <http://www.padangmedia.com/1-Berita/87410-Lebih-Satu-Juta-Orang-Tak-Memilih-di-Sumbar.html>

Berikut data jumlah pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat:

Tabel 2. jumlah pengguna hak pilih tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak	Persentase
1	Agam	338.386	227.517	67.24
2	Bukittinggi	81.384	49.484	60.81
3	Dharmasraya	145.671	117.921	80.95
4	Kepulauan Mentawai	57.541	44.191	76.80
5	Limapuluh Kota	269.914	192.583	71.24
6	Padang	656.389	352.174	53.65
7	Padang Pariaman	312.351	203.760	65.23
8	Pariaman	64.952	46.511	71.61
9	Padangpanjang	35.944	26.734	74.38
10	Pasaman	197.771	145.267	73.45.
11	Pasaman Barat	265.863	205.614	77.34
12	Payakumbuh	89.046	62.282	69.94
13	Pesisir Selatan	323.149	238193	73.71
14	Solok	273.365	191.352	70.00
15	Solok Kota	47.647	35.573	74.66
16	Solok Selatan	113.149	89.417	79.03
17	Sawahlunto	45.059	35.510	78,81
18	Sijunjung	149.698	114.276	76,34
19	Tanahdatar	279.758	185.911	66,45
TOTAL		3.747.037	2.564.270	68,49

Sumber : *Data KPU SUMBAR (http://www.padangmedia.com/1-Berita/87410-Lebih-Satu-Juta-Orang-Tak-Memilih-di-Sumbar.html)*

Berdasarkan tabel di atas terlihat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat tergolong rendah yaitu sekitar 68,49 persen, sementara rata-rata nasional 75 persen. Padahal jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat semakin giat melakukan sosialisasi. Sosialisasi pemilu dilakukan dengan berbagai cara dan menyasar ke segala golongan. Kenyataannya pengetahuan masyarakat terhadap masih rendah sehingga partisipasi pemilu

juga rendah pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan sosialisasi pemilu secara esensial adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu serta bagaimana tata cara bagi masyarakat untuk memilih agar partisipasi memilih meningkat. Namun, kenyataannya setelah diadakannya kegiatan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat masih ada saja masyarakat yang tidak mengetahui tata cara untuk memilih, masih ada saja masyarakat yang acuh dan tidak mengetahui arti pentingnya pemilu. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada berkurangnya partisipasi pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam dan mendetail tentang hambatan pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada hambatan-hambatan sosialisasi pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014. Sosialisasi pemilu hendaknya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting pemilu serta agar masyarakat mengetahui tata cara pemilu sehingga partisipasi pemilu meningkat. Faktanya di Provinsi Sumatera Barat dengan beragam macam sosialisasi yang telah diadakan, partisipasi pemilu legislatif tahun 2014 rendah yaitu 68% di bawah target nasional. Sosialisasi telah dilakukan, namun masyarakat masih banyak tidak mengetahui tata cara pemilu dan kurang menyadari arti penting

pemilu sehingga partisipasi pemilu rendah.

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: apa saja hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dialami KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu melahirkan sebuah karya ilmiah tentang sosialisasi pemilu yang merupakan bagian dari kajian sosiologi politik. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak yang berkepentingan khususnya para peneliti maupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengkaji tentang masalah yang sama yaitu mengenai sosialisasi pemilu.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak KPU Provinsi Sumatera Barat agar bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu dengan maksimal kepada seluruh masyarakat.

### **E. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dari Robert King Merton. Robert King Merton (biasa disingkat Robert K. Merton) lahir

pada tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh di Philadelphia Selatan. Ia berkuliah di universitas Temple kemudian melanjutkan di Universitas Harvard.<sup>7</sup> Merton menjelaskan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi dan fungsi-fungsi laten tidaklah sama. Fungsi laten adalah suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi, sesuatu yang fungsional bagi sistem yang dirancang. Namun, ada dua jenis konsekuensi tak terantisipasi lain : “hal-hal disfungsional bagi sistem yang telah ada dan itu semua mencakup disfungsi laten,” dan “hal-hal tidak relevan dengan sistem yang mereka pengaruhi secara fungsional atau disfungsional. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap konsekuensi-konsekuensi nonfungsional” (Merton, 1949/1968: 105).

Fungsi manifest adalah konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari system tersebut, sedang fungsi laten adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau disadari. Konsep fungsi laten memperluas perhatian para peneliti melampaui pertanyaan apakah sebuah tingkah laku mencapai tujuan yang diakui atau tidak. Fungsi laten ini sebetulnya bukan hal yang baru. Durkheim tentang kohesi sebagai konsekuensi hukuman merupakan analisis laten terhadap hukuman. Perbedaan Merton atas fungsi laten dan manifest ini mendorong sosiologis untuk melakukan analisis dibalik alasan aksi individu, tapi adat dan institusi yang sudah ada.

---

<sup>7</sup>Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi kontemporer. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Analisis Merton terhadap mesin politik misalnya, menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi laten dan manifest, yang menjelaskan cara institusi bekerja, dan bagaimana mereka bertahan. Hipotesanya, untuk survive, mesin harus melayani fungsi penting kepada kelompok sosial, dengan bertanya “siapa yang diuntungkan? dan mengungkap fungsi laten mesin, Merton membuat bagian klasik dalam analisis sosiologis.

Dalam penelitian ini terlihat adanya fungsi laten dari elemen yang bekerja untuk sosialisasi pemilu sehingga sosialisasi kurang maksimal. Misalnya KPU yang tidak bekerja sesuai fungsi yang dikehendaki (fungsi manifest). Tujuan sosialisasi pemilu secara esensial adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu serta bagaimana tata cara bagi masyarakat untuk memilih agar partisipasi memilih memingkat.

Namun, kenyataannya (fungsi laten) dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU hanya mengajak semata tanpa memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas tentang tata cara pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut mengakibatkan masih ada saja masyarakat yang tidak mengetahui tata cara untuk memilih, masih ada saja masyarakat yang acuh dan tidak mengetahui arti pentingnya pemilu. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada berkurangnya partisipasi pemilu.

## **F. Penjelasan Konsep**

### **1) Hambatan**

Menurut Badudu-Zain dalam sebuah sumber<sup>8</sup> mengemukakan bahwa hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehingga mengganggu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, hambatan yang dimaksud adalah hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu pada pemilu legislatif tahun 2014. Peneliti ingin mengetahui kendala apa yang terjadi sehingga sosialisasi tidak berjalan dengan baik dan partisipasi pemilu pada pemilu legislatif rendah di Sumatera Barat.

### **2) KPU (Komisi Pemilihan Umum)**

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum. Selain itu ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Lembaga lain yang dikenal dengan nama

---

<sup>8</sup>Badudu-Zain.1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.<sup>9</sup>

KPU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti ingin mengetahui kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Barat pada saat pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014.

### 3) **Sosialisasi Pemilu**

Menurut beberapa ahli seperti David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi pemilu yang merupakan bagian dari sosialisasi politik merupakan suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka *Pengantar Sosiologi Politik*. Dalam buku tersebut, Rush dan mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>T.A Legowo dkk. 2008. Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu. Jakarta :Praninta Offset

<sup>10</sup>Rush, Michael. dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dalam penelitian ini sosialisasi pemilu yang dimaksud adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilu legislatif 2014.

#### **4) Pemilu Legislatif**

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam penelitian ini, pemilu legislatif yang dimaksud adalah pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Sumatera Barat yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif selama 5 tahun kedepan.

### **G. Metodologi Penelitian**

#### **1) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan masih rendahnya partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat pada saat pemilu legislatif tahun 2014,

sehingga peneliti tertarik meneliti hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif pada tahun 2014.

## **2) Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dirasa mampu untuk mengungkap secara mendalam mengenai hambatan KPU Provinsi Sumatera dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2014.

Peneliti juga memilih tipe penelitian yaitu tipe studi kasus. Studi kasus ini dilakukan karena adanya kekhususan dari kasus yang diteliti adanya hambatan dari yang di alami KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilu Legislatif pada tahun 2014. Jenis studi kasus yang peneliti pilih adalah studi kasus instrinsik. Alasan penggunaan studi kasus instrinsik dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai kasus tertentu khususnya dalam penelitian ini adalah hambatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2014.

## **3) Teknik Pemilihan Informan**

Informan merupakan subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu diharapkan informannya adalah orang yang benar-benar memiliki pengetahuan yang luas tentang situasi dan kondisi lokasi dan menguasai permasalahan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara

*purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan maksud peneliti menentukan sendiri informan penelitian berdasarkan tujuan penelitian<sup>11</sup>. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pihak KPU di Provinsi Sumatera Barat, masyarakat umum dan anggota PPS dan PPK.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang diambil berdasarkan azas kejenuhan data yang artinya pengambilan informan dihentikan karena peneliti merasa data yang diperoleh telah cukup, mencapai kejenuhan data dan telah sesuai dengan pedoman wawancara dan tujuan penelitian. Jumlah informan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 10 orang dari pihak KPU Provinsi Sumbar.
2. 10 orang dari masyarakat umum di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang.
3. 3 orang dari anggota PPS dan PPK.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Observasi**

Pengamatan atau observasi yaitu mengamati secara langsung gejala-gejala yang akan diteliti dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan saat penelitian. Observasi yang dilakukan untuk

---

<sup>11</sup>Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

mengetahui secara langsung mengenai hambatan pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sosialisasi pemilu legislatif.

Observasi dilakukan secara tidak langsung artinya penelitiannya sebagai pengamat yaitu mengamati pihak penyelenggara KPU baik dari jumlah personil yang ada maupun kegiatan pihak penyelenggara KPU berkaitan dengan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah personil yang ada kurang atau tidak serta untuk mengetahui jadwal penyelenggaraan KPU. Dari hasil observasi terlihat memang personil KPU kurang terutama bidang sosialisasi. Petugas KPU dengan program kerja banyak sehingga sosialisasi kurang intens. Peneliti juga melakukan observasi sosialisasi KPU di dalam website resmi KPU Sumatera Barat. Di dalam website resmi tersebut ada simulasi pemilu yang merupakan bagian dari sosialisasi pemilu. Di dalamnya terdapat iklan dan cara-cara memilih yang bisa peneliti amati. Di dalam website resmi tersebut juga terdapat newsletter, alat peraga sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya untuk memilih. Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik observasi ini adalah lembaran format observasi.

#### **b) Wawancara**

Teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Pelaksanaan wawancara mendalam ini dilakukan berulang-ulang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan mampu memahami pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang hambatan pihak KPU

dalam sosialisasi pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat. Proses wawancara dimulai dari tanggal 26 November 2014. Wawancara dilakukan kepada petugas KPU Provinsi Sumatera Barat, panitia sosialisasi pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat, kepada mahasiswa dan masyarakat umum.

Wawancara dilakukan pada siang hari, ketika petugas KPU sedang berada di kantor, mahasiswa, dan masyarakat sedang beraktifitas. Kesulitan dalam proses wawancara ketika petugas KPU sibuk dengan jadwalnya masing-masing dan harus membuat janji terlebih dahulu.

Kesulitan dalam proses wawancara dengan anggota PPS dan PPK dan masyarakat ketika mereka tidak dapat menjelaskan proses sosialisasi yang telah berlangsung. Karena sebagian dari mereka sudah lupa dan ada pula yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut.

### **c) Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara. Studi dokumentasi ini berupa data tertulis mengenai jumlah mahasiswa, jumlah angka partisipasi mahasiswa dan sebagainya. Studi dokumentasi bisa peneliti dapatkan dari kantor-kantor terkait maupun dari sumber-sumber lain yang relevan. Data-data tersebut antara lain :

- Data profil KPU
- Daftar pemilih tetap

- Daftar relawan demokrasi
- Data/Dokumentasi ketika sosialisasi pemilu legislatif 2014 berlangsung

### 5) Triangulasi Data

Agar data yang diperoleh valid, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Hal tersebut dilakukan dengan cara triangulasi sumber berupa pertanyaan yang diajukan kepada berbagai sumber (informan) baik dari pihak KPU, masyarakat umum, secara berulang-ulang.

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik yaitu terhadap teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada teknik wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang dengan mengajukan pertanyaan yang relatif sama kepada informan yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan data secara akurat. Begitu juga dokumentasi dilakukan secara mendalam untuk melengkapi dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga mendapatkan ketepatan informasi dari hasil penelitian.

---

<sup>12</sup> Matthew B. Miles. A. Micahel Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press. Halaman 16-20

## 6) Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Peneliti memilih teknik analisis data tersebut karena menurut peneliti teknik tersebut mampu untuk menganalisis data-data penelitian tentang hambatan pihak KPU dalam sosialisasi pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Miles dan Huberman<sup>13</sup> analisis interaktif adalah "Kegiatan analisis yang dilakukan sebagai suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus sehingga membentuk suatu proses siklus interaktif (berhubungan satu sama lain)". Ada tiga komponen kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

*Reduksi Data*, yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemokusian, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

*Model Data (Data Display)*. Model adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif yang berasal dari catatan lapangan yang masih berserakan, tidak berurutan dan sangat luas. Model tersebut

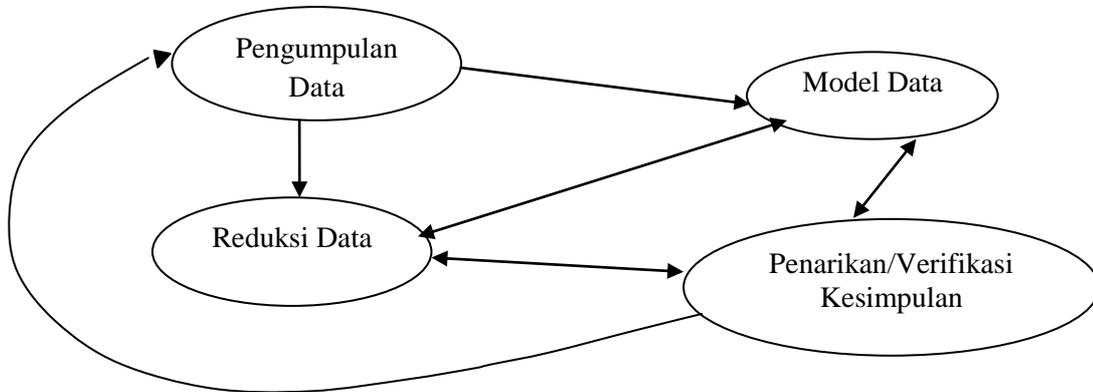
---

<sup>13</sup>Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Halaman 129-135

mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan.

*Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.* Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam hal ini secara ringkas, makna muncul dari data yang teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. Dengan cara lain kita berhenti dengan cerita-cerita menarik tentang kebenaran yang tidak diketahui dan bermanfaat.

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1: Komponen Analisis Data: Model Interaktif**

*Sumber: Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*

Dalam tinjauan ini ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Peneliti secara mantap bergerak di antara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak balik diantara reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus. Masalah reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan masuk ke dalam gambar secara berurutan sebagai episode-episode analisis masing-masing yang lain. Tetapi dua masalah yang lain selalu menjadi bagian dari dasar sehingga setiap tahapan kegiatan analisis saling berhubungan satu sama lain membentuk proses secara interaktif.